



## PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR  
TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN PEMBANTUKAN PANSUS LKPJ TAHUN 2023  
SENIN, 25 MARET 2024**

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

**YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARA  
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD  
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,  
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :

1. Penyampaian Nota Pengantar Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... ( Ketokan Palu 3 Kali ).

***Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;***

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2023, maka Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Pemerintahan berkewajiban menyampaikan kepada DPRD laporan Keterangan Pertanggungjawaban terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, yang mencakup mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD sebelumnya.

Perlu kita pahami bersama, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD dan Kepala Daerah sama-sama dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tugas dan kewajiban

bersama dari Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, DPRD tidak dalam kapasitas menerima dan menolak LKPJ Kepala Daerah.

Meskipun demikian, pembahasan LKPJ oleh DPRD tetap memiliki fungsi yang sangat strategis, oleh karena dari hasil pembahasan akan dilahirkan rekomendasi-rekomendasi yang akan digunakan oleh Kepala Daerah untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik terhadap aspek perencanaan, penganggaran maupun dalam pembentukan produk hukum daerah dan penetapan kebijakan strategis Kepala Daerah.

Dari LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD tersebut, kita akan dapat mengetahui sampai sejauhmana kinerja Kepala Daerah bersama perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk sampai sejauhmana target-target dapat diwujudkan serta permasalahan apa yang terdapat dalam pelaksanaannya.



***Rapat Paripurna dan Undangan Yang Kami Hormati;***

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, merupakan LKPJ ke ketiga dari Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2024 yang merupakan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dengan demikian hanya tinggal 1 (satu) LKPJ lagi yang akan disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD, yaitu LKPJ Tahun 2024 yang sekaligus berfungsi sebagai LKPJ akhir masa jabatan.

DPRD sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam LKPJ Tahun 2023 ini. Sudah sampai sejauhmana capaian kinerja Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai pada tahun 2023, apa permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusi yang diambil untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

Capain kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, dapat diukur dari capaian makro ekonomi

daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan yang menjadi urusan daerah serta pelaksanaan tugas pembangunan, baik pada tataran output maupun outcome serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran, capaian target dalam bentuk angka-angka statistik, akan tetapi juga perlu dilihat bagaimana kondisi riil di tengah-tengah masyarakat serta dampak pelaksanaan kegiatan tersebut terhadap daerah dan masyarakat.

Tidak sedikit program dan kegiatan realisasi dan target kinerja tercapai, tapi tidak memberikan manfaat dan dampak terhadap masyarakat. Orientasi penyusunan program dan kegiatan oleh OPD baru sebatas pengisian nomenklatur kegiatan yang sudah ditetapkan, belum berorientasi pada outcome dan dampak terhadap masyarakat.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;***

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Sesuai dengan agenda utama pada Rapat Paripurna, Sdr. Gubernur akan menyampaikan Nota Pengantarnya terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Tahun 2023

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

***Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;***

Kita sama-sama sudah mendengar dan menyimak Pengantar Gubernur Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dari Pengantar tersebut, secara umum kita sudah dapat mengetahui sejauhmana kinerja dan capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023 serta permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan surat Mendagri Nomor 100.2.7/1548/OTDA tanggal 10 Maret 2023, DPRD melakukan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Dalam pembahasan nanti, DPRD tidak hanya melihat pada aspek penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga perlu melihat bagaimana pelaksanaan rekomendasi DPRD dari LKPJ tahun-tahun sebelumnya dan bagaimana pula pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun-tahun sebelumnya, progresnya berjalan lambat dan tidak disampaikan pula secara periodik kepada DPRD, sehingga menyulitkan DPRD



untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Demikian juga dari aspek pelaksanaan tugas pembantuan, baru sebatas laporan realisasi anggaran. Pemerintah Daerah belum dapat memberikan sudah sampai sejauhmana dukungan tugas pembantuan tersebut terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan daerah.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti, Komisi-Komisi dan Panitia Khusus harus lebih jeli dan tajam melihat permasalahan yang terdapat dalam LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023, agar dapat dihasilkan rekomendasi yang berkualitas untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;***

Dengan telah disampaikan Nota Pengantar Gubernur terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat kekurangan dan kelemahan yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan “ Alhamdulillahirabbilalamin “ Rapat Paripurna kita pada hari ini secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

**Terima kasih.**  
**Billahitaufiqwalhidayah**  
**Wss.wr.wb**

*f25-24.*  
*03*